



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat

Helti Handraini ¹⁾, Aldri Frinald ²⁾, Asnil ³⁾, Nora Eka Putri ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

Email: ¹⁾ heltihandrainichan@gmail.com ; ²⁾ aldri@fis.unp.ac.id ; ³⁾ asnilmelayu@gmail.com

; ⁴⁾ noraekaputri@fis.unp.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Oktober 2024]

Revised [27 November 2024]

Accepted [02 Desember 2024]

KEYWORDS

Original Regional Income (PAD),
Balancing Fund, Regional Finance

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pasaman Barat, seperti banyak daerah di luar pusat-pusat ekonomi utama di Indonesia, sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa PAD, yang seharusnya mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal, masih terbatas, sehingga kondisi fiskal daerah menjadi rentan. Penelitian ini menganalisis pengaruh rendahnya PAD dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan di Kabupaten Pasaman Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui peninjauan studi literatur yang mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen resmi. Teknik analisis yang diterapkan adalah studi dokumen untuk memahami kebijakan pemerintah daerah dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Pasaman Barat terhambat oleh ketergantungan pada Dana Perimbangan, serta adanya kelemahan dalam tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur. Namun, terdapat peluang untuk mengurangi ketergantungan dengan diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi potensi ekonomi lokal.

ABSTRACT

West Pasaman, like many regions outside the main economic centers in Indonesia, relies heavily on transfers of funds from the central government through the Balancing Fund, which includes the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH). This dependence shows that PAD, which should reflect regional capabilities in managing local resources, is still limited, so that regional fiscal conditions become vulnerable. This research analyzes the influence of low PAD and Balancing Funds on financial independence in West Pasaman Regency. Using a descriptive qualitative approach, this research describes and analyzes the influence of PAD and Balancing Funds on the financial independence of local governments. Data was collected through a review of literature studies including scientific journals, government reports and official documents. The analysis technique applied is document study to understand local government policies and their impacts. The research results show that West Pasaman's financial independence is hampered by dependence on the Balancing Fund, as well as weaknesses in governance, human resource capacity and infrastructure. However, there are opportunities to reduce dependency by diversifying income sources and optimizing local economic potential.

PENDAHULUAN

Dalam sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Salah satu indikator kunci keberhasilan otonomi ini adalah kemampuan daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri. PAD mencerminkan sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan potensi lokalnya sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Namun, kenyataan yang terjadi di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat, menunjukkan bahwa PAD masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai kemandirian keuangan daerah.

Pasaman Barat, seperti banyak daerah di luar pusat-pusat ekonomi utama di Indonesia, masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan. Dana Perimbangan ini, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), telah menjadi penopang utama bagi pendapatan daerah. Sementara itu, PAD yang seharusnya menjadi penanda kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal, kontribusinya masih sangat terbatas. Tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan ini menunjukkan bahwa banyak daerah, termasuk Pasaman Barat, masih berada dalam kondisi fiskal yang rentan dan belum sepenuhnya mandiri secara keuangan. Berdasarkan data APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun

Anggaran 2024, Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat tercatat hanya sekitar Rp. 131.060.214.925. Sementara itu, pendapatan yang berasal dari Dana Transfer dari pusat dan antar daerah mencapai sekitar Rp. 1.109.873.020.322. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Pasaman Barat jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan dari Dana Transfer. Ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer dari pemerintah pusat dan daerah lain dapat menjadi masalah serius. Jika PAD rendah, artinya daerah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaannya secara mandiri, sehingga lebih bergantung pada bantuan dari luar. Dampaknya, Kabupaten Pasaman Barat mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan program-program daerah secara berkelanjutan dan mandiri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan ini juga memunculkan sejumlah implikasi penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu masalah yang paling nyata adalah bahwa daerah kehilangan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan mereka. Dana Perimbangan, terutama DAU dan DAK, sering kali datang dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Dengan demikian, ruang gerak untuk inovasi kebijakan keuangan dan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal menjadi sangat terbatas. Selain itu, rendahnya kontribusi PAD juga menjadi indikator dari beberapa masalah struktural yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman Barat. Meskipun daerah memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, potensi-potensi ini belum tergarap secara optimal untuk menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sektor-sektor potensial tersebut. Akibatnya, PAD yang dihasilkan dari banyak sumber lokal, seperti pajak daerah dan retribusi, masih jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Tidak hanya itu, ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan juga berdampak pada kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang. Ketika terjadi krisis fiskal di tingkat nasional atau ketika ada perubahan kebijakan fiskal yang signifikan di tingkat pusat, daerah-daerah yang sangat bergantung pada Dana Perimbangan akan mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas keuangan mereka. Fluktuasi dalam penerimaan Dana Perimbangan dapat menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dalam situasi seperti ini, daerah yang memiliki PAD yang rendah akan sangat rentan terhadap tekanan fiskal yang dihasilkan oleh perubahan tersebut.

Lebih jauh lagi, tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan juga dapat menyebabkan daerah kehilangan dorongan untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru. Daerah yang terbiasa dengan aliran dana transfer dari pusat cenderung kurang terdorong meningkatkan efisiensi dan inovasi pengelolaan sumber daya lokal. Ketidakmampuan daerah untuk mengoptimalkan PAD akan memperdalam kesenjangan fiskal antara daerah yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik dengan daerah yang masih bergantung pada transfer dana pusat. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar disparitas antara daerah maju dan daerah tertinggal. Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan salah satu contoh daerah yang sangat bergantung pada Dana Perimbangan, menghadapi tantangan besar dalam upaya mencapai kemandirian fiskal. Meskipun berbagai potensi ekonomi lokal tersedia, tantangan dalam mengelola sumber daya tersebut secara efisien dan berkelanjutan menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan PAD. Jika PAD tidak dapat ditingkatkan secara signifikan, maka kemandirian keuangan daerah akan sulit tercapai, dan ketergantungan pada Dana Perimbangan akan terus berlanjut. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya upaya-upaya yang lebih serius dan strategis dalam meningkatkan PAD, baik melalui kebijakan lokal yang lebih inovatif maupun penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

Dalam konteks ini, strategi untuk meningkatkan PAD menjadi sangat penting bagi Kabupaten Pasaman Barat dan daerah-daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Tanpa peningkatan PAD yang signifikan, daerah akan terus bergantung pada Dana Perimbangan, yang secara struktural membatasi fleksibilitas fiskal mereka dan menghambat proses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penguatan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD menjadi langkah yang harus diutamakan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai potensi dan sumber daya yang ada di daerah tersebut. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain



yang sah. Pengelolaan PAD yang efektif sangat penting bagi kemandirian finansial pemerintah daerah, karena PAD tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD didefinisikan sebagai "Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ahmad Dahlan (2010), seorang pakar ekonomi daerah, "Meningkatkan PAD merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemandirian fiskal daerah." Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan PAD. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah tidak hanya dapat membiayai program-program pembangunan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin, serta untuk memastikan bahwa semua daerah dapat menyediakan layanan publik yang memadai. Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen utama: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan dijelaskan sebagai "pengalihan sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah." Dengan adanya Dana Perimbangan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Perimbangan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Bambang Brodjonegoro (2015), mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, berpendapat, "Dana Perimbangan adalah instrumen penting dalam mendukung otonomi daerah dan pemerataan pembangunan." Ia mengingatkan bahwa meskipun Dana Perimbangan dapat membantu daerah, pengelolaan yang baik dan strategi pembangunan yang tepat harus tetap diutamakan agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup seluruh aspek pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa keuangan dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "keuangan daerah adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain yang sah." Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah tidak hanya tergantung pada PAD dan Dana Perimbangan, tetapi juga pada sumber pendapatan lain yang sah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Menurut Emil Salim (1997), "Keuangan daerah yang sehat dan transparan adalah fondasi bagi otonomi daerah yang efektif." Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana fokus utama adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan keleluasaan dalam menggali data dari berbagai sumber yang relevan untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peninjauan studi literatur. Peninjauan literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah, serta Dana Perimbangan. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, buku, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik

penelitian. Peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori dan konsep yang mendasari fenomena yang dikaji serta mendapatkan data sekunder yang diperlukan dalam analisis.

Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen memungkinkan peneliti untuk menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari hasil peninjauan literatur guna memahami kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan teknik ini, data yang diperoleh dari dokumen dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola atau kecenderungan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktural Terhadap Kontribusi Rendah PAD Dalam Konteks Ketergantungan Fiskal Daerah Kab. Pasaman Barat

Kelemahan tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu faktor krusial yang menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasaman Barat. Birokrasi yang padat dan tidak efisien sering kali memperlambat proses administratif yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sistem manajemen yang tidak efektif ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Sebagai contoh, proses perizinan usaha yang berbelarut-larut serta regulasi yang tidak jelas dapat menghambat masuknya investor baru ke wilayah tersebut. Ketidakpastian hukum juga menjadi faktor penghambat bagi pengusaha yang ingin membuka bisnis di Pasaman Barat, karena mereka memerlukan kejelasan dan kecepatan dalam mendapatkan izin usaha agar dapat beroperasi dengan lancar. Hambatan ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola pemerintahan yang harus segera diperbaiki untuk meningkatkan PAD.

Selain kelemahan dalam tata kelola, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah juga menjadi tantangan signifikan. Aparatur pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola potensi ekonomi lokal. Keterbatasan ini terlihat dari rendahnya kemampuan mereka dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan serta kurangnya pemahaman mengenai ekonomi modern, seperti ekonomi digital, yang semakin mendominasi pasar global. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah gagal mengikuti tren ekonomi baru yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan baru. Misalnya, kurangnya pengetahuan tentang penerapan teknologi digital dan e-commerce menghambat daerah untuk memaksimalkan potensi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang seharusnya bisa meningkatkan PAD. Keterbatasan SDM ini jelas menjadi hambatan besar dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Faktor infrastruktur pendukung yang belum memadai juga memperburuk situasi. Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, fasilitas energi, dan komunikasi yang buruk menghambat aktivitas ekonomi, khususnya dalam mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi besar. Di Pasaman Barat, salah satu sektor andalan yang berpotensi besar adalah industri kayu. Namun, karena infrastruktur transportasi yang buruk, distribusi produk kayu ke pasar yang lebih luas menjadi terhambat, sehingga mengurangi daya saing produk lokal. Ketersediaan energi yang tidak stabil juga berdampak langsung pada produktivitas industri, terutama bagi industri yang bergantung pada ketersediaan listrik. Masalah logistik dan energi ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik sebagai syarat utama untuk mendukung peningkatan PAD.

Dalam konteks yang lebih luas, kendala-kendala struktural yang dihadapi Pasaman Barat ini dapat dihubungkan dengan teori desentralisasi fiskal. Menurut teori ini, daerah seharusnya memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya lokalnya untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Namun, di Pasaman Barat, kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat justru membatasi ruang gerak daerah dalam mengelola sumber dayanya secara optimal. Hal ini membuat PAD tetap rendah dan daerah terjebak dalam lingkaran ketergantungan fiskal, di mana sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan yang disalurkan oleh pusat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi desentralisasi fiskal yang lebih memberikan ruang bagi daerah untuk memanfaatkan potensi ekonominya sendiri secara mandiri.

Kebijakan ekonomi lokal juga memegang peranan penting dalam memengaruhi PAD. Kurangnya efektivitas kebijakan ekonomi lokal sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan sektor ekonomi yang lebih potensial. Jika kebijakan lebih fokus pada sektor tradisional yang pertumbuhannya lambat, maka peluang untuk meningkatkan PAD menjadi terbatas. Di Kabupaten Pasaman Barat, misalnya, sektor agrowisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun kurangnya implementasi kebijakan yang mendukung sektor ini menyebabkan potensi tersebut belum



tergarap maksimal. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dalam hal pengembangan kebijakan ekonomi lokal juga minim, sehingga membuat daerah semakin sulit mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih inovatif dan berpotensi tinggi.

Namun demikian, terlepas dari berbagai kendala yang ada, masih terdapat peluang transformasi ekonomi lokal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Kabupaten Pasaman Barat dapat mengembangkan sektor-sektor industri hilir yang memberikan nilai tambah lebih tinggi, seperti industri furniture berbasis kayu lokal, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya berupa bahan mentah. Selain itu, investasi dalam infrastruktur pendukung juga harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi logistik. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme sangat diperlukan agar mereka mampu mengelola ekonomi daerah secara lebih efektif. Dengan strategi-strategi ini, Pasaman Barat dapat mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan dan bergerak menuju kemandirian keuangan yang lebih berkelanjutan.

Pengaruh Fluktuasi Dana Perimbangan Terhadap Stabilitas Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat

Ketergantungan Kabupaten Pasaman Barat pada Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat menjadi faktor krusial yang memengaruhi stabilitas keuangan daerah. Di Pasaman Barat, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, alokasi Dana Perimbangan dari pusat menjadi komponen utama dalam menyusun anggaran daerah. Namun, fluktuasi aliran dana tersebut kerap kali menyebabkan instabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi ini menempatkan Pasaman Barat pada posisi rentan terhadap dinamika ekonomi makro nasional, di mana perubahan kebijakan fiskal pusat dapat memberikan dampak langsung yang besar pada keberlanjutan program-program pembangunan. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada transfer dana pusat, ketidakpastian dalam alokasi Dana Perimbangan menjadi tantangan serius bagi kelangsungan keuangan daerah.

Dinamika kebijakan fiskal nasional yang sering kali berubah menambah kompleksitas masalah ini. Pasaman Barat, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi situasi di mana keputusan fiskal pemerintah pusat, seperti pengurangan anggaran belanja atau penyesuaian dalam skema Dana Perimbangan, dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Perubahan mendadak dalam alokasi dana transfer dapat mengganggu perencanaan anggaran jangka panjang daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai contoh, penyesuaian anggaran belanja pusat yang dipicu oleh defisit fiskal nasional dapat memaksa pemerintah pusat mengurangi alokasi Dana Perimbangan, sehingga daerah seperti Pasaman Barat yang sangat bergantung pada transfer ini akan langsung terkena dampaknya. Hal ini memperlihatkan bagaimana dinamika kebijakan fiskal nasional dapat memengaruhi stabilitas anggaran daerah, dengan risiko merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada program pembangunan tersebut.

Ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan juga menimbulkan risiko fiskal yang tidak kecil bagi Pasaman Barat. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya penurunan alokasi dana tersebut akibat krisis ekonomi nasional atau defisit fiskal di tingkat pusat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah pusat sering kali harus melakukan pemotongan anggaran untuk menyeimbangkan keuangan negara, dan dana yang ditransfer ke daerah akan menjadi salah satu komponen yang terkena dampaknya. Bagi daerah dengan PAD rendah seperti Pasaman Barat, penurunan Dana Perimbangan dapat menimbulkan kesulitan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Keterbatasan ini pada gilirannya akan merugikan masyarakat dan memperburuk kualitas hidup di daerah tersebut.

Penurunan Dana Perimbangan yang terjadi secara tiba-tiba atau berkala bisa berdampak serius pada stabilitas keuangan Pasaman Barat. Dengan PAD yang rendah, daerah ini tidak memiliki banyak alternatif untuk menutupi kekurangan pendapatan yang disebabkan oleh berkurangnya alokasi Dana Perimbangan. Ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer pusat mempersempit fleksibilitas fiskal daerah, sehingga ketika terjadi penurunan, pemerintah daerah dipaksa untuk memangkas anggaran di berbagai sektor penting. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menjadi korban utama pemotongan anggaran, yang pada akhirnya akan memperburuk kualitas layanan publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana penurunan Dana Perimbangan dapat menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat lokal, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Tantangan fiskal yang semakin berat ini menuntut Kabupaten Pasaman Barat untuk mengembangkan strategi manajemen risiko fiskal yang efektif. Ketergantungan pada satu sumber

pendapatan, yaitu Dana Perimbangan, harus segera diatasi dengan diversifikasi sumber pendapatan yang lebih luas. Peningkatan PAD merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Daerah harus mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi lokal yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dengan meningkatkan kapasitas PAD, Pasaman Barat dapat memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik dan tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika kebijakan fiskal nasional.

Dalam konteks manajemen risiko fiskal, pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap potensi ancaman keuangan. Perspektif manajemen risiko fiskal harus menjadi bagian integral dalam perencanaan anggaran daerah. Analisis risiko secara berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan daerah akibat fluktuasi Dana Perimbangan. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan membangun cadangan keuangan yang cukup untuk menghadapi kemungkinan penurunan alokasi dana dari pusat. Selain itu, perencanaan anggaran yang fleksibel, yang mencakup skenario-skenario alternatif ketika terjadi penurunan pendapatan, dapat membantu daerah untuk lebih siap menghadapi ketidakpastian fiskal.

Secara keseluruhan, fluktuasi Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas keuangan Kabupaten Pasaman Barat. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat menciptakan tantangan besar dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional serta risiko penurunan pendapatan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi Pasaman Barat untuk segera mengembangkan strategi manajemen risiko fiskal yang komprehensif, termasuk peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, daerah ini dapat memperkuat kemandirian fiskalnya dan tetap melanjutkan program-program pembangunan yang berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada Dana Perimbangan.

Strategi Inovasi Dan Kebijakan Fiskal Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Pasaman Barat

Penguatan kelembagaan fiskal menjadi langkah awal yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga yang bertugas mengelola anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperkuat, baik dari segi struktur maupun fungsinya. Pembentukan dan penguatan lembaga seperti Badan Anggaran (BAP) yang memiliki peran sentral dalam penyusunan, implementasi, dan pengawasan anggaran daerah sangat krusial. Kelembagaan fiskal yang kuat akan memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Profesionalisme aparatur di lembaga-lembaga tersebut juga harus ditingkatkan agar mampu merespons dinamika ekonomi lokal dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, pelatihan dan sertifikasi bagi para pegawai di bidang anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pengelolaan fiskal modern.

Selain itu, diversifikasi sumber-sumber PAD merupakan strategi inovatif yang tidak bisa diabaikan. Mengandalkan hanya satu atau dua sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD akan menimbulkan risiko tinggi, terutama ketika terjadi perubahan ekonomi yang tidak terduga. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti pariwisata dan agribisnis yang belum tergarap secara maksimal. Misalnya, potensi wisata alam seperti air terjun dan pantai yang indah dapat dioptimalkan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Di samping itu, sektor agrowisata juga bisa menjadi alternatif yang menarik dengan memanfaatkan kekayaan alam setempat. Diversifikasi usaha ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD karena mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan dan menciptakan aliran pendapatan baru yang lebih stabil.

Kapasitas administrasi pajak daerah juga harus ditingkatkan untuk mendukung upaya meningkatkan PAD. Tanpa sistem administrasi pajak yang efisien, potensi pendapatan dari pajak daerah tidak akan tergarap dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah melalui pelatihan di bidang pengelolaan pajak modern sangat penting. Penerapan teknologi informasi, seperti sistem pajak online, dapat membantu mempercepat proses pengumpulan pajak dan mengurangi risiko birokrasi yang lambat. Misalnya, dengan implementasi e-faktur, proses faktur pajak bisa dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, meminimalisir kesalahan manual yang sering kali menjadi hambatan dalam proses pengumpulan pajak. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Optimalisasi potensi ekonomi lokal merupakan langkah lain yang penting dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Pasaman Barat. Daerah ini memiliki sektor agraris yang dominan, dan dengan teknologi pertanian yang lebih canggih, produktivitas sektor ini bisa ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, integrasi dengan pasar global melalui peningkatan ekspor produk-produk unggulan seperti hasil pertanian dan kayu dapat membuka peluang baru dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pasaman Barat juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri hilir seperti furniture dari kayu lokal yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi



masyarakat setempat. Dengan demikian, optimalisasi sektor-sektor ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Inovasi di bidang teknologi juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak. Saat ini, teknologi digital menawarkan berbagai solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak. Penerapan sistem manajemen pajak elektronik (e-tax) dan aplikasi mobile untuk pengaduan serta pelaporan pajak dapat membantu mengatasi masalah birokrasi yang rumit. Selain itu, teknologi seperti big data analytics dapat digunakan untuk menganalisis pola pembayaran pajak dan mengidentifikasi area yang berpotensi menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Teknologi blockchain juga dapat dimanfaatkan untuk mencatat transaksi keuangan dengan lebih transparan dan aman, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan pajak.

Selain inovasi-inovasi tersebut, model kebijakan fiskal adaptif perlu diterapkan untuk menghadapi dinamika ekonomi lokal dan global. Kebijakan fiskal yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons perubahan ekonomi dengan cepat tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan. Misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi global, model kebijakan fiskal daerah harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi tersebut tanpa mengganggu prioritas pembangunan yang telah direncanakan. Kebijakan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan tantangan spesifik yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman Barat, baik dari segi ketergantungan pada Dana Perimbangan maupun potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang belum tergarap secara maksimal.

Dalam kesimpulannya, untuk meningkatkan kemandirian keuangan di Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan strategi-strategi yang inovatif dan komprehensif. Penguatan kelembagaan fiskal, diversifikasi sumber-sumber PAD, peningkatan kapasitas administrasi pajak, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan teknologi modern dalam pengelolaan pajak merupakan langkah-langkah penting yang harus segera diimplementasikan. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari daerah-daerah lain yang berhasil dalam meningkatkan PAD, Kabupaten Pasaman Barat dapat mengurangi ketergantungannya pada Dana Perimbangan dan membangun otonomi fiskal yang lebih kuat. Dengan demikian, daerah ini akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dan dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal daerah ini. Fluktuasi Dana Perimbangan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Sementara itu, kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai semakin memperburuk kondisi tersebut, menyebabkan PAD masih berada pada tingkat yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan PAD melalui penguatan kelembagaan fiskal dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal sangat diperlukan.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi Kabupaten Pasaman Barat untuk mengurangi ketergantungannya pada Dana Perimbangan dan meningkatkan PAD secara signifikan. Diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta penerapan teknologi modern dalam administrasi pajak dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan penerapan strategi-strategi ini, Pasaman Barat dapat membangun otonomi fiskal yang lebih kuat dan meningkatkan daya saing ekonominya. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan proaktif guna menghadapi dinamika ekonomi di masa depan.

Saran

1. Penguatan Kelembagaan Fiskal, Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat harus memperkuat kelembagaan fiskal melalui pembentukan lembaga-lembaga yang berfungsi secara efisien dan transparan. Hal ini melibatkan pelatihan intensif bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan anggaran dan PAD.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah, Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian modern, dan industri hilir. Pemerintah daerah harus fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan kontribusi jangka panjang terhadap peningkatan pendapatan daerah.
3. Peningkatan Infrastruktur Fisik dan Digital, Investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, energi, dan teknologi informasi harus diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi daerah. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pengumpulan pajak harus dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang menghambat.

4. Model Kebijakan Fiskal Adaptif, Pemerintah daerah harus mengembangkan model kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global maupun lokal. Kebijakan yang responsif terhadap krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pusat akan membantu daerah menjaga stabilitas keuangan dan mencegah penurunan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota Manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 26-35.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 14(1), 44-52.
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(2), 390-399.
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(04).
- Nindita, N. L. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12-19.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64-77.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 41-51.
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).